

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM.

1. Definisi.

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang.
- b. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan.

2. Klasifikasi.

Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Jangka Pendek.
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang.
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang kepada pemerintah pusat, utang kepada lembaga keuangan bank (LKB), utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dan utang kepada masyarakat. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
 - 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	SKPD/SKPKD
	Utang Bunga	SKPD/SKPKD
	Utang Pinjaman Jangka Pendek	SKPD/SKPKD

Kelompok	Jenis	Kewenangan
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	SKPKD
	Pendapatan Diterima Dimuka	SKPD/SKPKD
	Utang Belanja	SKPD/SKPKD
	Utang Jangka Pendek Lainnya	SKPD/SKPKD
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat	SKPKD
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	SKPKD
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	SKPKD
	Utang kepada Masyarakat	SKPKD

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD.

1. Pihak-pihak Terkait.
- Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas: PPTK, PPKom, PPK SKPD, dan PPKD.
- a. Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)
- Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); dan
 - 3) menyiapkan dokumen pembayaran.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
- Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKom melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); dan
 - 3) menyiapkan dokumen pembayaran.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
 - 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
 - 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas:

- 1) menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD; dan
- 2) melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara SKPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh PPK SKPD.

e. Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh PPK SKPD.

f. Bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD mencatat semua pengeluaran kas terkait transaksi kewajiban di SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam system akuntansi kewajiban antara lain:

- a. keputusan kepala daerah; dan/atau
- b. nota pesanan; dan/atau
- c. berita acara serah terima; dan/atau
- d. putusan hakim; dan/atau
- e. kuitansi; dan/atau
- f. surat perjanjian kerja; dan/atau
- g. SP2D GU/TU; dan/atau
- h. SP2D LS; dan/atau
- i. surat pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPD;
- j. bukti memorial; dan/atau
- k. dokumen lain yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Tapera.

Pada saat SKPD melakukan pemotongan pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Tapera, tetapi sampai dengan akhir periode belum dilakukan penyetoran kepada pihak yang berhak sesuai dengan perundang-undangan. Pemotongan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran atau belanja seperti gaji, belanja barang dan jasa dengan dokumen SP2D LS/SP2D GU/TU. Berdasarkan pada dokumen tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban	XXX	
		XXX	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		XXX
		XXX	RK PPKD/Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

*) Untuk transaksi dengan mekanisme LS menggunakan akun RK PPKD sedangkan untuk transaksi dengan mekanisme GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

- b. Utang Bunga
- Utang bunga merupakan biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pada saat SKPD menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga. Berdasarkan nota debit maka PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban bunga utang kepada...	XXX	
		XXX	Utang bunga kepada ...		XXX

Pada saat SKPD melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS atau SP2D GU/TU. Berdasarkan dokumen tersebut, maka PPK SKPD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bunga kepada ...	XXX	
		XXX	RK PPKD/Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

*) Untuk transaksi dengan mekanisme LS menggunakan akun RK PPKD sedangkan untuk transaksi dengan mekanisme GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja bunga utang kepada ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- c. Utang Pinjaman Jangka Pendek
- Utang Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non bank/BLUD yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan atau kurang dari satu periode akuntansi.

Pada saat SKPD menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan pemerintah daerah lainnya/lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non bank/BLUD dengan menerima nota kredit bank. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	Utang Pinjaman Jangka Pendek kepada Pemerintah Daerah Lainnya/LKB/ LKBB/BLUD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lainnya/ LKB/LKBB/BLUD - Jangka Pendek		XXX

Pada saat SKPD melakukan penyetoran ke Kas Daerah, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal oleh SKPD

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal oleh SKPKD

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Pada saat SKPD melakukan pelunasan utang pinjaman jangka pendek kepada pemerintah daerah lainnya/lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non bank/BLUD berdasarkan perjanjian pinjaman dan nota debit dari bank, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal oleh SKPD

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal oleh SKPKD

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Pinjaman Jangka Pendek kepada Pemerintah Daerah Lainnya/LKB/ LKBB/BLUD	XXX	
		XXX	Beban Bunga	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya/LKB/ LKBB/BLUD - Jangka Pendek	XXX	
		XXX	Belanja Bunga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- d. Pendapatan Diterima Dimuka
- Pendapatan Diterima Dimuka merupakan besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

Pada saat SKPD menerima kas atas barang atau jasa tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa. Pada saat tersebut, SKPD menerima nota kredit bank atau dokumen lain yang dipersamakan dan berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut (contohnya sewa):

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Hasil Sewa BMD		XXX

Pada saat SKPD menyerahkan sebagian/seluruh dari barang atau jasa yang telah tercatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dengan menerbitkan Berita Acara Serah Terima penyerahan barang atau jasa tersebut. Berdasarkan BAST tersebut, SKPD melakukan pengakuan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka dan penambahan pendapatan dengan membuat bukti memorial. Atas dasar BAST dan bukti memorial tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Hasil Sewa BMD - LO		XXX

Keterangan: jumlah yang dicatat sebesar nilai barang atau jasa yang diserahkan

- e. Utang Belanja
- Akuntansi utang belanja di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang. Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK SKPD akan mengakui adanya utang. Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan Pendekatan Aset.

- 1) Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/ pembelian barang yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan.

Pada saat SKPD melakukan pembelian barang dan belum dilakukan pelunasan/pembayaran, PPK SKPD akan menerima Nota Pesanan/Berita Acara Serah Terima Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal pengadaan barang sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Barang	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang		XXX

- 2) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme TU/GU.

Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia barang, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan menerima kuitansi pembayaran atau dokumen yang dipersamakan. Berdasarkan kuitansi pembayaran atau dokumen yang dipersamakan tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal pelunasan utang belanja persediaan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang.....	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang	XXX*)	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX*)

*) Pengakuan dan pencatatan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode perpetual.

- 3) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS. Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia barang, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal pelunasan utang belanja barang sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang.....	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang	XXX*)	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX*)

*) Pengakuan dan pencatatan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode perpetual.

C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPKD

Akuntansi kewajiban SKPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu: (1) akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPKD terdiri atas: Fungsi Akuntansi SKPKD, BUD dan SKPKD.

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada SKPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) mem-*posting* jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

- 1) Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, pembayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas: menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang; dan
- 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban SKPKD antara lain:

- a. peraturan kepala daerah; dan/atau
- b. surat perjanjian utang; dan/atau
- c. nota kredit; dan/atau
- d. SP2D GU/TU; dan/atau
- e. SP2D LS; dan/atau
- f. bukti memorial; dan/atau
- g. dokumen lain yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Tapera.

Pada saat SKPD melakukan pemotongan pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Tapera, tetapi sampai dengan akhir periode belum dilakukan penyetoran kepada pihak yang berhak sesuai dengan perundang-undangan. Pemotongan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran atau belanja seperti gaji, belanja barang dan jasa dengan dokumen SP2D LS/SP2D GU/TU.

Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal sebagai berikut.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban	XXX	
		XXX	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		XXX
		XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

*) Untuk transaksi dengan mekanisme LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah sedangkan untuk transaksi dengan mekanisme GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

- b. Utang Bunga
- Utang bunga merupakan biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pada saat pemerintah daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga. Berdasarkan nota debit maka fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban bunga utang kepada...	XXX	
		XXX	Utang bunga kepada ...		XXX

Pada saat pemerintah daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS atau SP2D GU/TU. Berdasarkan dokumen tersebut, maka fungsi akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bunga kepada ...	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

*) Untuk transaksi dengan mekanisme LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah sedangkan untuk transaksi dengan mekanisme GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja bunga utang kepada ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- c. Utang Pinjaman Jangka Pendek
- Utang Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non bank/BLUD yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan atau kurang dari satu periode akuntansi.

Pada saat pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan pemerintah daerah lainnya/lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non bank/BLUD dengan menerima nota kredit bank. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Utang Pinjaman Jangka Pendek kepada Pemerintah Daerah Lainnya/LKB/ LKBB/BLUD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lainnya/ LKB/LKBB/BLUD - Jangka Pendek		XXX

Pada saat pemerintah daerah melakukan pelunasan utang pinjaman jangka pendek kepada pemerintah daerah lainnya/ lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan non bank/ BLUD berdasarkan perjanjian pinjaman dan nota debit dari bank, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Pinjaman Jangka Pendek kepada Pemerintah Daerah Lainnya/LKB/ LKBB/BLUD	XXX	
		XXX	Beban Bunga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya/LKB/ LKBB/BLUD - Jangka Pendek	XXX	
		XXX	Belanja Bunga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- d. Pendapatan Diterima Dimuka
- Pendapatan Diterima Dimuka merupakan besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

Pada saat pemerintah daerah menerima kas atas barang atau jasa tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa. Pada saat tersebut, pemerintah daerah menerima nota kredit bank atau dokumen lain yang dipersamakan dan berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut (contohnya sewa):

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Hasil Sewa BMD		XXX

Pada saat pemerintah daerah menyerahkan sebagian/seluruh dari barang atau jasa yang telah tercatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dengan menerbitkan Berita Acara Serah Terima penyerahan barang atau jasa tersebut. Berdasarkan BAST tersebut, pemerintah daerah melakukan pengakuan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka dan penambahan pendapatan dengan membuat bukti memorial. Atas dasar BAST dan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Hasil Sewa BMD - LO		XXX

Keterangan: jumlah yang dicatat sebesar nilai barang atau jasa yang diserahkan

- e. Utang Belanja
- Akuntansi utang belanja di pemerintah daerah terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang. Ketika pemerintah daerah melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, fungsi akuntansi SKPKD akan mengakui adanya utang. Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan Pendekatan Aset.
- 1) Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/pembelian barang yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan.

Pada saat pemerintah daerah melakukan pembelian barang dan belum dilakukan pelunasan/pembayaran, fungsi akuntansi SKPKD akan menerima Nota Pesanan/Berita Acara Serah Terima Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengadaan barang sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Barang	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang		XXX

- 2) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme TU/GU.

Pada saat pemerintah daerah melakukan pembayaran barang kepada penyedia barang, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan menerima kuitansi pembayaran atau dokumen yang dipersamakan. Berdasarkan kuitansi pembayaran atau dokumen yang dipersamakan tersebut fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pelunasan utang belanja persediaan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang.....	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang	XXX*)	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX*)

*) Pengakuan dan pencatatan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode perpetual.

- 3) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS. Pada saat pemerintah daerah melakukan pembayaran barang kepada penyedia barang, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pelunasan utang belanja barang sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang.....	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang	XXX*)	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX*)

*) Pengakuan dan pencatatan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode perpetual.

- f. Kewajiban Jangka Panjang
Pengakuan dan pencatatan kewajiban jangka panjang berhubungan langsung dengan pengakuan dan pencatatan pembiayaan sehingga jurnal standar untuk kewajiban terkait dengan jurnal standar pembiayaan.

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pengakuan penerimaan pembiayaan berdasarkan pada perjanjian pinjaman jangka panjang atau nota kredit dari bank atau dokumen lain yang dipersamakan, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Kewajiban Jangka Panjang - Utang kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/LKB/LKBB/Masyarakat		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/LKB/LKBB/Masyarakat - Jangka Panjang		XXX

Pada saat pemerintah daerah melakukan pembayaran bunga kewajiban atas pembiayaan, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bunga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bunga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat pemerintah daerah melakukan pelunasan kewajiban atas pembiayaan, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kewajiban Jangka Panjang - Utang kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/LKB/LKBB/Masyarakat atau Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang - Utang kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/LKB/LKBB/Masyarakat	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/LKB/LKBB/Masyarakat - Jangka Panjang	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat pemerintah daerah melakukan reklasifikasi kewajiban pembiayaan menjadi Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang, pemerintah daerah menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kewajiban Jangka Panjang - Utang kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/LKB/LKBB/Masyarakat	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang - Utang kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/LKB/LKBB/Masyarakat		XXX

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO